

## Bab 3

# ISU ISU STRATEGIS PENDIDIKAN

### A. Kebijakan Strategis

Orientasi pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Timur direpresentasikan ke dalam pengarusutamaan berbagai variabel dan aspek pembangunan yang akan memberi corak seluruh program pembangunan. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan pendidikan di Jawa Timur pada masing-masing pilar sebagai berikut:

#### 1. Pemerataan dan Perluasan Akses

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan sesuai dengan prioritas pembangunan pendidikan di Jawa Timur. Kecuali itu juga memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Upaya peningkatan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar seringkali terkendala oleh kondisi sosial ekonomi, budaya serta geografi dan demografi.

Upaya peningkatan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar seringkali terkendala oleh kondisi sosial ekonomi, budaya serta geografi dan demografi, sehubungan dengan itu maka strategi yang akan ditempuh adalah :

- a. Terus mengupayakan keberlanjutan program bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan BOS Daerah (Bosda/Bopda) sampai jenjang SD/MI serta SMP/MTs disertai dengan sosialisasi, pembinaan dan pengendalian yang tertib dan akurat dalam rangka menjaga kepercayaan semua pihak tentang manfaat program tersebut;
- b. Memperbanyak pemberian beasiswa serta subsidi-subsidi lainnya (sekolah gratis) khususnya bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi dan pemberian beasiswa bagi siswa yang memasuki program keahlian berbasis keunggulan potensi daerah;
- c. Memperbanyak implementasi program *school come to client*, sekolah mendatangi siswa, khususnya untuk wilayah miskin dan pedesaan/terpencil melalui penyelenggaraan sekolah kecil kelas jauh, *mobile training unit* (MTU) dan sebagainya;
- d. Melakukan efisiensi dan efektivitas investasi pembangunan sarana pendidikan dan optimalisasi pemanfaatan fasilitas pendidikan yang telah ada melalui penyelenggaraan sekolah terpadu;
- e. Memanfaatkan teknologi komunikasi dalam penyelenggaraan pendidikan (pembelajaran jarak jauh, *broadcasting-radio* dan tv pendidikan);

- f. Membeayai penyelenggaraan secara gotong royong antara masyarakat, pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat, termasuk pembangunan unit sekolah baru;
- g. Memperluas akses hubungan antara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan pondok pesantren terkait dengan pengembangan pendidikan baik yang bersifat formal maupun non formal. Sementara itu pembinaan dan bantuan terhadap madrasah (MI, MTs, MA) juga makin diintensifkan;
- h. Menyusun rencana kebutuhan serta strategi pemenuhan dan pemerataan pendidik (TK, Pendidikan Dasar, PLB, Pendidikan Menengah) dan Tenaga Kependidikan (pengawas sekolah, pegawai tata-usaha, laboran, pustakawan) baik formal maupun non formal;
- i. Mengembangkan model penyiapan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan formal dan informal untuk daerah khusus;
- j. Menyetarakan kualitas pelayanan pendidikan pada semua jenjang dan jalur satuan pendidikan termasuk pendidikan kesetaraan;
- k. Memperbanyak fasilitas pendidikan gratis bagi masyarakat miskin usia sekolah;
- l. Pengadaan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan untuk masyarakat penyandang ketunaan/cacat;
- m. Peningkatan pemberantasan buta aksara latin dengan melakukan pembenahan manajemen data penduduk yang buta aksara lain.
- n. Mengembangkan SMA Negeri Olahraga guna mewadahi siswa yang memiliki kecerdasan kinestetik tinggi dan mengembangkan potensi cabang-cabang olahraga di Jawa Timur.

## 2. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing

Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing diarahkan pada kecakapan hidup bersama dalam keragaman, peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan daya saing bangsa, dan pembentukan karakter bangsa, khususnya bagi warga masyarakat Jawa Timur. Mutu pendidikan juga dilihat dari meningkatnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai humanisme yang meliputi keteguhan iman dan takwa serta berakhlak mulia, etika, wawasan kebangsaan, kepribadian tangguh, ekspresi estetika dan kualitas jasmani. Pada dasarnya indikator mutu pendidikan adalah kualitas lulusannya, sedangkan aspek yang sangat dominan dalam peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan adalah guru, kurikulum manajemen, fasilitas sarana-prasarana pendidikan, sistem yang diterapkan serta dana yang tersedia.

Pada dasarnya indikator mutu pendidikan adalah kualitas lulusannya, sedangkan aspek yang sangat dominan dalam peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan adalah guru, manajemen, fasilitas, kurikulum, sistem yang diterapkan serta dana yang tersedia. Sehubungan dengan itu maka strategi yang akan ditempuh adalah:

- a. Mengupayakan pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan secara komprehensif, holistik, tidak linear dan tidak parsial, baik dari segi input, proses, maupun output;
- b. Peningkatan kualifikasi akademik guru yang belum S1 atau D4 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Peningkatan kemampuan guru melalui berbagai kegiatan penataran, workshop, pendidikan dan kepelatihan (diklat), magang, pendampingan, misal pengimplementasian lesson study, dll.
- d. Mengupayakan peningkatan kompetensi guru dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi terstandar dan bertaraf internasional;
- e. Peningkatan kualitas masukan siswa yang akan masuk SD/MI, SMP/MTs, SM/MA, SMK dengan cara melalui tes masuk, tes tersebut digunakan untuk pemetaan kemampuan siswa;
- f. Melakukan pembinaan manajemen sekolah berbasis MBS yang berkelanjutan;
- g. Mengembangkan TIK secara optimal untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran;
- h. Meningkatkan alokasi anggaran pendidikan termasuk di kabupaten kota minimal 20%;
- i. Memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai dengan keunggulan lokal yang dimiliki;
- j. Meningkatkan peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan;
- k. Menyelenggarakan lomba dan kompetisi antar sekolah dan atau antar Kabupaten/Kota secara berkelanjutan;
- l. Memberi penghargaan yang riil atas prestasi kinerja baik akademik maupun nonakademik;
- m. Memberi subsidi untuk kegiatan inovasi maupun peningkatan fasilitas pendidikan/pembelajaran serta peningkatan dan sertifikasi kompetensi guru, profesi guru, dan tenaga kependidikan yang lain;
- n. Mengembangkan budaya dan kesenian untuk membangun watak dan karakter bangsa.
- o. Mengoptimalkan peranan Museum dan situs sejarah lainnya sebagai sumber belajar.
- p. Meningkatkan sekolah standar nasional ke sekolah bertaraf internasional.

### 3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik

Sejalan dengan tujuan pembangunan pendidikan di Jawa Timur adalah mendorong kebijakan sektoral agar mampu memberikan arah reformasi pendidikan secara efektif, efisien dan akuntabel, pembangunan pendidikan

di Jawa Timur juga diarahkan untuk mendukung realisasi pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta memberikan pelayanan yang bermutu, efektif, efisien sesuai kebutuhan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui internalisasi etos kerja serta disiplin kerja yang tinggi sebagai bentuk akuntabilitas aparatur negara serta perwujudan profesionalisme aparatur.

Sebagai salah satu provinsi yang ada di Indonesia, Jawa Timur harus mampu menjadi teladan bagi provinsi lain dalam hal pendidikan agar bisa memasok Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas di tingkat nasional. Selain itu, untuk meningkatkan citra provinsi Jawa Timur, kualitas SDM di Jawa Timur harus diupayakan lebih unggul dengan provinsi lain. Pengembangan pendidikan di provinsi Jawa Timur harus difokuskan pada upaya menjadikan sekolah efektif, yaitu sekolah yang menunjukkan tingkat kinerja dan hasil belajar yang tinggi sesuai dengan tugas pokoknya. Mutu pembelajaran dan hasil belajar yang memuaskan tersebut merupakan produk akumulatif seluruh layanan yang dilakukan sekolah dan pengaruh iklim kondusif yang diciptakan di sekolah.

Dalam rangka meningkatkan citra pendidikan di Jawa Timur, di setiap kota atau minimal per eks-karesidenan juga perlu dikembangkan suatu sekolah yang berstandar Internasional pada setiap tingkat satuan pendidikan, mulai SD/MI, SLTP/MTs, SMA/MA hingga SMK diarahkan untuk mengembangkan potensi daerah sehingga menjadi keunggulan lokal. Pengembangan sekolah menengah kejuruan yang berbasis pada potensi daerah selain mengurangi pengangguran juga meningkatkan perekonomian daerah.

Pembangunan sekolah yang berstandar Internasional dapat dikembangkan dengan program sekolah kawasan. Hal itu berarti bahwa dalam suatu kawasan berkumpul sekolah-sekolah yang berstandar internasional mulai TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA hingga SMK.

Dalam rangka mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja terampil dan memperhatikan kemampuan serta kondisi ekonomi masyarakat, pengembangan pendidikan di Jawa Timur harus diimbangi dengan SMK yang berbasis keunggulan lokal. Jumlah SMK harus ditingkatkan. Perbandingan ideal SMK dengan SMA adalah 60 : 40. Dengan pertimbangan bahwa pendirian dan pembiayaan SMK lebih mahal daripada SMA, pemerintah daerah harus mengalokasikan sumber dana untuk menopang SMK. Hal itu membutuhkan komitmen para Kepala Daerah dalam mengalokasikan sumber dana.

Upaya penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pada masing-masing satuan pendidikan sebagai berikut:

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik di bidang PAUD diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol dan evaluasi kinerja PAUD secara nyata dan efektif. Untuk itu akan dilakukan peningkatan advokasi, sosialisasi/pemasyarakatan dan pembudayaan pentingnya PAUD kepada orangtua, masyarakat dan pemerintah daerah. Penyediaan data dan sistem informasi PAUD, serta peningkatan kerja sama *stakeholder* pendidikan, merupakan faktor pendukung untuk membangun kesamaan persepsi, pencitraan yang positif, dan kebersamaan tanggung jawab dalam pengelolaan PAUD yang akuntabel.

b. Pendidikan Dasar (Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun)

- 1) Pengembangan kapasitas dan peran Dewan Pendidikan (DP) dan Komite Sekolah (KS), serta Komite PNF terus dilakukan dalam rangka pemberdayaan partisipasi masyarakat untuk ikut bertanggungjawab mengelola pendidikan dasar. Berfungsinya kedua kelembagaan tersebut secara optimal akan memperkuat pelaksanaan prinsip *good governance* dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
- 2) Pengembangan kapasitas juga akan terus dilakukan terhadap para pengurus sekolah atau satuan pendidikan non-formal lainnya untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan *leadership* menuju otonomi pengelolaan. Kegiatan ini, bersama dengan penguatan DP/KS/Komite PNF, merupakan bagian dari upaya penerapan MBS dan Manajemen Berbasis Masyarakat (MBM) secara maksimal.
- 3) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pada semua jenjang pendidikan.
- 4) Pengembangan EMIS (*Education Management Information Systems*) sebagai sistem pendukung manajemen untuk menunjang keberhasilan dengan tolok ukur sejumlah indikator penting, seperti perluasan, mutu, dan efisiensi sesuai dengan standar nasional pendidikan dasar.
- 5) Mengembangkan TIK secara optimal untuk meningkatkan layanan pendidikan.

c. Program Pendidikan Menengah

Seperti pada jenjang pendidikan dasar, peningkatan *tata kelola*, akuntabilitas, dan daya saing dilakukan dalam kerangka sistem dan mekanisme yang sama, dalam isu-isu partisipasi masyarakat, MBS (DP/KS), pengembangan kapasitas, dan pengembangan EMIS. Perluasan partisipasi masyarakat akan didorong lebih luas dengan melibatkan dunia usaha dan industri dalam pengelolaan pendidikan kejuruan.

Mengingat pendidikan menengah akan menjadi program wajib belajar 12 tahun, maka partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan akan diupayakan. Untuk itu, kemampuan dan kemauan untuk melakukan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel akan memberikan citra kelembagaan yang positif, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pengelola. Masyarakat juga diharapkan terlibat secara proaktif dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi anggaran penyelenggaraan pendidikan.

d. Program Pendidikan Nonformal

Prinsip fundamental dari penyelenggaraan pelayanan pendidikan non-formal adalah peran aktif atau partisipasi masyarakat untuk membantu kemandirian dan mengangkat derajat serta taraf hidup masyarakat yang kurang beruntung. Oleh karena itu, penyelenggaraan PNF yang efektif, efisien dan akuntabel menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat penyelenggara dan pemerintah daerah setempat. Karena prinsip penyelenggaraan yang partisipatif ini, pencitraan kelembagaan yang transparan dan akuntabel menjadi kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara pendidikan non-formal.

Dalam penyelenggaraan PNF yang banyak melibatkan partisipasi masyarakat, pemerintah pusat berperan memberikan fasilitasi dan pengendalian/ penjaminan mutu, melalui bantuan pembiayaan dan program-program sosialisasi dan pelatihan. Beberapa langkah pemerintah (Depdiknas) dalam peningkatan *tata kelola*, akuntabilitas, dan pencitraan penyelenggaraan PNF adalah sebagai berikut:

- 1) Penataan dan pengembangan sistem pendataan dan manajemen informasi. Usaha ini memerlukan sinergi tripartit, yaitu ahli pendidikan, ahli substansi, dan ahli media/informatika.
- 2) Pengembangan kapasitas; diberikan kepada pengelola dan penyelenggara PNF di semua tingkatan, baik di pusat maupun daerah (BPPLSP, BPKB, SKB, dan PKBM).
- 3) Advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi; diperlukan untuk memberikan informasi, kampanye, dan bantuan dalam rangka meningkatkan dan memperluas partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PNF yang efektif dan akuntabel.

c. Peningkatan Efisiensi Manajemen Pendidikan

Sesuai dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya sekolah, pada dasarnya efisiensi manajemen pendidikan sangat ditentukan oleh ketepatan sosialisasi program, koordinasi, disiplin, etos kerja serta kecermatan perencanaan. Sehubungan dengan itu perlu ditempuh strategi:

- 1) Peningkatan monitoring dan evaluasi dengan fokus pada supervisi (pembinaan dan pembimbingan) yang intensif, tertib dan akuntabel;
- 2) *Review* terhadap pelaksanaan program ;
- 3) Penyelenggaraan Kotak Pos 33;
- 4) Pembudayaan pelayanan publik yang prima;
- 5) Implementasi standar ISO di SMK lebih meluas dan intensif;
- 6) Peningkatan TIK untuk meningkatkan layanan pendidikan.

## B. Strategi Implementasi Kebijakan

Kebijakan strategis sebagaimana dipaparkan sebelumnya, perlu di carikan strategi implementasi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, dalam kerangka melaksanakan misi dan mewujudkan visi pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Penyusunan Renstra Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), di samping bertumpu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Departemen Pendidikan Nasional, juga bertumpu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur.

Renstra yang telah disusun oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur, akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan bertumpu pula pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan kebijakan, melahirkan strategi implementasi kebijakan dan program strategis yang bersifat lebih teknis dan operasional. Beberapa strategi

implementasi kebijakan dan program strategis, dalam kerangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Penetapan skala prioritas bidang pendidikan.
2. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, setiap lima tahun.
3. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
4. Strategi Teknis Implementasi Kebijakan dan Program Strategis.

Strategi teknis implementasi kebijakan dan program strategis tersebut di atas akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Strategi Penetapan Prioritas Kebijakan dan Program Strategis.

Penetapan skala prioritas bidang pendidikan, merupakan tahap awal dalam menyusun Renstra dan RKT Dinas Pendidikan. Penetapan skala prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan, di samping mengacu pada skala prioritas bidang pendidikan yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, juga mengacu skala prioritas bidang pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Skala prioritas bidang pendidikan pada tataran Departemen, dapat ditemukan pada RPJP maupun RPJM Departemen Pendidikan Nasional. Sementara, skala prioritas bidang pendidikan Provinsi Jawa Timur, dapat ditemukan pula pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD Provinsi Jawa Timur. Sekalipun demikian, skala prioritas bidang pendidikan, berdasarkan kecenderungan isu strategis (*strategic issues*), dan berdasarkan pada RPJP, RPJM Departemen Pendidikan Nasional, serta RPJPD, RPJMD, dan RKPD Provinsi Jawa Timur, telah ditemukan skala prioritas bidang pendidikan antara lain sebagai berikut.

- a. Aspek Pemerataan dan Perluasan Akses ;
- b. Aspek Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing;
- c. Aspek Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik.

Skala prioritas bidang pendidikan tersebut, perlu ditetapkan pada setiap pentahapan, baik dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra), maupun dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

2. Strategi Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis (Renstra) instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Timur, harus senantiasa berkesinambungan, relevan dan konsisten, tidak saja dengan RPJM Departemen Pendidikan Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur, tapi juga antara Renstra periode tahun ke satu

dengan periode tahun berikutnya, dengan mengacu pada *Grand Design Pendidikan* yang telah disusun dan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

### 3. Penetapan Prioritas Kebijakan dan Program Strategis.

Berdasarkan prinsip pembangunan pendidikan di Jawa Timur serta serangkaian isu strategis tersebut di atas, disusun program pembangunan pendidikan di Jawa Timur yang dilandasi tiga pilar pembangunan pendidikan nasional, yakni: a) pemerataan dan perluasan akses pendidikan, b) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, dan c) *governance*, akuntabilitas dan pencitraan publik. Program pembangunan di setiap satuan pendidikan serta aspek pembangunan pendidikan yang lain dinarasikan di bawah ketiga pilar pembangunan pendidikan tersebut.

Dalam upaya peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan di Jawa Timur disusun program-program pengembangan pendidikan pada setiap jenis satuan pendidikan sebagai berikut:

#### a. Program Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan

##### 1) Program PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

Perluasan akses PAUD baik jalur formal maupun non formal, dengan kegiatan pokok strategis:

- a) Peningkatan Unit Sekolah Baru (USB) dan penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) TK/RA;
- b) Peningkatan jumlah lembaga PAUD nonformal : KB, TPA dan lain-lain;
- c) Pendanaan biaya operasional PAUD, bantuan/subsidi untuk TK/RA;
- d) Rehabilitasi Ruang Kelas TK/RA;
- e) Pengangkatan guru PNS/DPK untuk TK/RA;
- f) Pengangkatan guru KB/TPA;
- g) Pengangkatan tenaga kependidikan untuk TK/RA;
- h) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya PAUD (terkait dengan konsep *the golden age* );
- i) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat yang masih terhambat budaya, bahwa perempuan pun punya hak untuk mendapatkan akses belajar dan berkembang;
- j) Peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan kesenian jenjang dasar dan menengah
- k) Pembinaan Posyandu sebagai lembaga PAUD.

##### 2) Program Pendidikan Dasar di SD/MI

Kegiatan pokok strategis yang direncanakan:

- a) Pembangunan USB SD/MI di wilayah tertentu, karena ada wilayah yang sudah jenuh sehingga beberapa SD/MI terpaksa ditutup atau dimerger;



- b) Pembangunan RKB SD/MI;
  - c) Rehabilitasi RK SD/MI baik negeri maupun swasta;
  - d) Pemberian *blockgrant* bagi SD/MI Inti;
  - e) Bantuan/subsidi bagi SD/MI swasta;
  - f) Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui penyusunan SIN (*Student Identification Number*);
  - g) Pengangkatan guru kelas, guru mata pelajaran (agama, penjaskes, seni, bahasa Inggris, komputer, dan muatan lokal);
  - h) Pengangkatan tenaga pendidikan, tenaga TU dan Perpustakaan yang profesional;
  - i) Pembangunan SD/MI Kecil di wilayah terpencil;
  - j) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat yang masih terhambat budaya, bahwa perempuan pun punya hak untuk mendapatkan akses belajar dan berkembang.
- 3) Program Pendidikan Dasar di SMP/MTs
- Kegiatan pokok strategis yang direncanakan :
- a) Pembangunan USB SMP/MTs di wilayah tertentu (kantong buta aksara);
  - b) Pembangunan RKB SMP/MTs;
  - c) Rehabilitasi ruang kelas SMP/MTs yang rusak ringan dan berat
  - d) Pemberian *blockgrant* bagi SMP/MTs Standar Nasional;
  - e) Bantuan/subsidi bagi SMP/MTs swasta;
  - f) Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui penyusunan *Student Identification Number* (SIN);
  - g) Pengangkatan guru (mata pelajaran dan muatan lokal); yang profesional
  - h) Pengangkatan tenaga pendidikan, tenaga TU dan Perpustakaan yang profesional;
  - i) Pembangunan SMP/MTs Kecil, SD/MI-SMP/MTs satu atap di wilayah terpencil;
  - j) Menambah jumlah SMP/MTs terbuka di wilayah terpencil;
  - k) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat yang masih terhambat budaya, bahwa perempuan pun punya hak untuk mendapatkan akses belajar dan berkembang;
  - l) Pemberian rekomendasi, izin operasional bagi pendirian SMP/MTs swasta di kabupaten/kota, dan melakukan pembinaan yang berkelanjutan.
- 4) Program Pendidikan Menengah di SMA
- Kegiatan pokok strategis yang direncanakan :
- a) Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMA dan MA;

- b) Rehabilitasi RK SMA dan MA yang rusak ringan dan berat;
- c) Pemberian Dana Bantuan Operasional (DBO) berdasar data akurat dan terkontrol baik, agar tidak terjadi pemberian rangkap, berdasarkan *Student Identification Number (SIN)*;
- d) Pemberian *blockgrant* bagi SMA dan MA berstandar nasional dan bertaraf internasional;
- e) Bantuan/subsidi bagi SMA swasta;
- f) Perluasan pemberian bantuan khusus murid (BKM) dan beasiswa;
- g) Pengangkatan guru (mata pelajaran dan muatan lokal) yang profesional;
- h) Pengangkatan tenaga pendidikan, tenaga TU dan Perpustakaan yang profesional;
- i) Pendirian program studi/unit produksi berbasis keunggulan lokal;
- j) Pembangunan SMA Kecil, SMP/MTs-SMA satu atap di wilayah terpencil;
- k) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat yang masih terhambat budaya bahwa perempuan pun punya hak untuk mendapatkan akses belajar dan berkembang;
- l) Menambah jumlah SMA Terbuka;
- m) Pemberian rekomendasi, izin operasional bagi pendirian SMA swasta di kabupaten/kota, dan melakukan pembinaan yang berkelanjutan.

5) Program Pendidikan Menengah di SMK

Kegiatan pokok strategis yang direncanakan:

- a) Pembangunan USB SMK;
- b) Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMK;
- c) Rehabilitasi RK SMK rusak ringan dan berat
- d) Pemberian Dana Bantuan Operasional (DBO) berdasar data akurat dan terkontrol baik, agar tidak terjadi pemberian rangkap, berdasarkan *Student Identification Number (SIN)*;
- e) Pemberian *blockgrant* bagi SMK;
- f) Bantuan/subsidi bagi SMK swasta;
- g) Mengembangkan SMK terutama yang berbasis keunggulan lokal, dan berstandar internasional;
- h) Bantuan pendirian bengkel kerja dan ruang pameran (*showroom*) hasil produksi;
- i) Perluasan pemberian BKM (Bantuan Khusus Murid) dan beasiswa
- j) Pengangkatan guru (mata pelajaran dan muatan lokal);

- k) Pengangkatan tenaga pendidikan, tenaga TU dan Perpustakaan;
  - l) Pengembangan SMK kelas jauh di Pondok Pesantren, dan rintisan SMK di SMP/MTs;
  - m) Alih fungsi BLK/SPMA/SMF/SMA dan lembaga lain menjadi SMK;
  - n) Pengembangan SMK berstandar nasional dan bertaraf internasional;
  - o) Bantuan pemberian modal kerja bagi lulusan SMK;
  - p) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat yang masih terhambat penambahan program keahlian/unit produksi atau SMK berbasis keunggulan lokal;
  - q) budaya bahwa perempuan juga punya hak untuk mendapatkan akses belajar;
  - r) Pemberian rekomendasi, izin operasional bagi pendirian SMK di kabupaten/kota, dan melakukan pembinaan yang berkelanjutan.
- 6) Program Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
- Kegiatan pokok strategis yang direncanakan :
- a) Pembangunan USB SLB dengan berbagai variannya;
  - b) Pembangunan RKB SLB;
  - c) Rehabilitasi RK SLB yang rusak ringan dan berat;
  - d) Penambahan sekolah inklusif di SD/MI, SMP/MTs, SMA;
  - e) Peningkatan bantuan biaya operasional sekolah inklusif;
  - f) Bantuan/subsidi bagi SLB swasta;
  - g) Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
  - h) Pengangkatan guru yang profesional;
  - i) Pengangkatan tenaga pendidikan, dan tenaga TU yang profesional;
  - j) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat yang masih terhambat budaya bahwa perempuan pun punya hak untuk mendapatkan akses belajar dan berkembang;
  - k) Melengkapi fasilitas bagi penyelenggaraan Sekolah Inklusif bagi anak berkebutuhan khusus.
- 7) Program Pendidikan Non Formal
- Kegiatan pokok strategis yang direncanakan :
- a) Pembangunan ruang kelas untuk Sanggar Belajar dan sejenisnya;
  - b) Rehabilitasi ruang kelas Sanggar Belajar, Rumah Singgah dan sejenisnya;

- c) Bantuan/subsidi bagi yayasan penyelenggara;
- d) Bantuan biaya pendampingan;
- e) Bantuan modal bagi usaha kewirausahaan;
- f) Bantuan pendampingan pembentukan jejaring (*networking*) antar penyelenggara dan peserta;
- g) Pengangkatan tutor yang berkompotensi memadai;
- h) Bantuan biaya peralatan seni bagi sanggar anak jalanan;
- i) Bantuan dana penyelenggaraan Kejar Paket A/B/C;
- j) Melaksanakan program Kejar Paket A/B/C di pesantren;
- k) Bantuan modal awal usaha bagi lulusan KF;
- l) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat yang masih terhambat budaya bahwa perempuan pun punya hak untuk mendapatkan akses belajar dan berkembang;
- m) Mengaktifkan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) secara maksimal untuk mencegah terjadinya Buta Aksara Kembali;
- n) Penanganan/pendampingan anjal (anak jalanan) lebih intensif dengan mengembalikan mereka ke sekolah sesuai tingkat pendidikan yang telah diperoleh/dijalani semula.

#### 8) Program Peningkatan Pengembangan Kesenian Sekolah

Kegiatan pokok strategis yang direncanakan ialah :

- a) Peningkatan sosialisasi pengembangan seni tentang kesenian sekolah melalui internet;
- b) Pengaktifan sanggar-sanggar seni di sekolah-sekolah;
- c) Peningkatan Bantuan biaya peralatan seni bagi sanggar di sekolah-sekolah;
- d) Peningkatan ajang kreatifitas seni pada sekolah-sekolah;
- e) Peningkatan bantuan operasional bagi sekolah-sekolah seni;
- f) Pengangkatan guru-guru seni yang profesional;
- g) Peningkatan bantuan gedung-gedung kesenian di sekolah-sekolah;
- h) Penyebarluasan pemahaman seni budaya melalui kegiatan pertukaran siswa/pengiriman siswa baik di tingkat nasional, regional (Asia), dan internasional

#### b. Program Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing

Berdasarkan jenis dan tingkatan satuan pendidikan, maka dalam kaitan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan di Jawa Timur disusun program-program pengembangan pendidikan sebagai berikut:

##### 1) Program PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

- a) Pengembangan perangkat pembelajaran, bahan ajar, model pembelajaran dan sistem penilaian;

- b) Bantuan pengadaan perpustakaan dan penambahan koleksi bagi TK/RA;
  - c) Bantuan pengembangan media belajar, alat bermain dan alat pendidikan;
  - d) Bantuan pendampingan akreditasi bagi TK/RA;
  - e) Sertifikasi dan uji kompetensi pendidik TK/RA;
  - f) Diklat pengembangan konsep dan metodologi pembelajaran (terutama model pembelajaran *Beyond Centres and Circles Time*) bagi guru KB/TPA/TK/RA;
  - g) Bantuan penyusunan modul pembelajaran etika dan budi pekerti luhur.
- 2) Program Pendidikan Dasar di SD/MI
- a) Pengembangan dan pelaksanaan KTSP yang berkelanjutan;
  - b) Pengembangan perangkat pembelajaran, bahan ajar, model pembelajaran berbasis pada pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efisien dan menyenangkan (PAIKEM) dan sistem penilaian bernasis
  - c) Bantuan pengadaan perpustakaan dan penambahan koleksi bagi SD/MI;
  - d) Bantuan pembelian buku ajar standar;
  - e) Membangun laboratorium komputer bagi SD/MI dan atau melengkapi sarana laboratorium sains;
  - f) Bantuan pengembangan perangkat pembelajaran, media belajar, dan alat pendidikan;
  - g) Bantuan pembinaan dan pelaksanaan akreditasi bagi SD/MI;
  - h) Pengembangan SD/MI inti sebagai SD/MI asuh bagi SD/MI;
  - i) Perintisan SD/MI bertaraf internasional;
  - j) Pengembangan muatan lokal bahasa jawa;
  - k) Pemberian beasiswa bagi siswa SD/MI berprestasi;
  - l) Pemilihan siswa SD/MI teladan;
  - m) Olympiade sains dan matematika bagi siswa SD/MI baik di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;
  - n) Lomba kreativitas bagi siswa SD/MI;
  - o) Pelatihan penulisan karya ilmiah (berbasis PTK/RA dan lain-lain) bagi guru;
  - p) Lomba penulisan karya ilmiah bagi guru SD/MI;
  - q) Lomba kreativitas bagi guru SD/MI;
  - r) Pemilihan guru SD/MI teladan tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi Jawa Timur dan pengirimannya dalam lomba tingkat nasional;

- s) Penyelenggaraan Porseni tingkat SD/MI se Kabupaten/Kota dan se Provinsi Jawa Timur;
  - t) Penyelenggaraan Pekan Seni Pelajar tingkat SD/MI/SMP/MTs/SMK/MA
  - u) Bantuan untuk sertifikasi (kuliah) dan uji kompetensi pendidik SD/MI;
  - v) Penyusunan *Teacher Identification Number* (TIN) atau Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) bagi persiapan pemberian tunjangan profesi;
  - w) Diklat pengembangan konsep dan metodologi pembelajaran terkini berlandaskan *transformative learning* dan paradigma *learn-unlearn-relearn*;
  - x) Diklat UKS dan Pendidikan Gizi bagi guru Penjaskes;
  - y) Diklat penggunaan ICT (termasuk *e-learning*) bagi guru/tenaga pendidikan dan Kepala Sekolah;
  - z) Diklat teknologi dan pengolahan produk potensi daerah bagi guru muatan lokal;
  - aa) Lokakarya implementasi budi pekerti luhur di sekolah;
  - bb) Bantuan penyusunan modul pembelajaran etika dan budi pekerti luhur;
  - cc) Revitalisasi gerakan kepanduan/Pramuka di SD/MI;
  - dd) Diklat Siaran Radio Pendidikan (SRP) bagi guru/tenaga kependidikan;
  - ee) Kursus bahasa Inggris jarak jauh bagi guru SD/MI;
  - ff) Peningkatan penerimaan insentif bagi guru/tenaga kependidikan;
  - gg) Pelaksanaan UNAS silang penuh baik lokasi maupun pengawasan;
  - hh) Monitoring dan evaluasi serta supervisi pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran di SD/MI;
  - ii) Memberlakukan membaca wajib 10 menit setiap awal masuk kelas setiap hari bagi seluruh warga belajar, baik kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, TU dan terutama siswa untuk mengembangkan budaya baca (*drop every thing and read*);
  - jj) Meningkatkan kemitraan sekolah dengan DUDI yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengikat.
- 3) Program Pendidikan Dasar di SMP/MTs
- a) Pengembangan dan pelaksanaan KTSP secara berkelanjutan;
  - b) Pengembangan perangkat pembelajaran, bahan ajar, model pembelajaran berbasis pada pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efisien dan menyenangkan (PAIKEM) dan sistem penilaian;

- c) Bantuan pengadaan perpustakaan dan penambahan koleksi bagi SMP/MTs;
- d) Bantuan pembelian buku ajar standar;
- e) Membangun laboratorium komputer bagi SMP/MTs dan atau melengkapi sarana laboratorium sains serta laboratorium bahasa;
- f) Bantuan pengembangan media belajar, alat bermain dan alat pendidikan;
- g) Bantuan pembinaan dan pelaksanaan akreditasi bagi SMP/MTs;
- h) Pengembangan SMP/MTs SSN sebagai SMP/MTs asuh bagi SMP/MTs non SSN;
- i) Perintisan SMP/MTs bertaraf internasional dimulai dari penerapan bilingual;
- j) Pengembangan muatan lokal bahasa Jawa di SMP/MTs;
- k) Pemberian beasiswa bagi siswa SMP/MTs berprestasi;
- l) Pemilihan siswa SMP/MTs teladan;
- m) Olympiade sains dan matematika bagi siswa SMP/MTs baik di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;
- n) Lomba kreativitas bagi siswa SMP/MTs;
- o) Pelatihan penulisan karya ilmiah (berbasis PTK/RA dan lain-lain) bagi guru;
- p) Lomba penulisan karya ilmiah bagi guru SMP/MTs;
- q) Lomba kreativitas bagi guru SMP/MTs;
- r) Pemilihan guru SMP/MTs teladan tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi Jawa Timur dan pengirimannya dalam lomba tingkat nasional;
- s) Penyelenggaraan POPDA tingkat se Kabupaten/Kota dan se provinsi Jawa Timur;
- t) Bantuan untuk sertifikasi (kuliah) dan uji kompetensi pendidik SMP/MTs;
- u) Penyusunan *Teacher Identification Number* (TIN) bagi persiapan pemberian tunjangan profesi;
- v) Diklat pengembangan konsep dan metodologi pembelajaran terkini berlandaskan *transformative learning* dan paradigma *learn-unlearn-relearn*;
- w) Diklat UKS dan Pendidikan Gizi bagi guru Penjaskes;
- x) Diklat penggunaan ICT (termasuk *e-learning*) bagi guru/tenaga pendidikan dan Kepala Sekolah;
- y) Diklat teknologi dan pengolahan produk potensi daerah bagi guru muatan lokal;
- z) Lokakarya implementasi budi pekerti luhur di sekolah;

- aa) Bantuan penyusunan modul pembelajaran etika dan budi pekerti luhur;
  - bb) Revitalisasi gerakan kepanduan/Pramuka di tingkat SMP/MTs;
  - cc) Diklat Siaran Radio Pendidikan (SRP) bagi guru/tenaga kependidikan;
  - dd) Kursus bahasa Inggris jarak jauh bagi guru SMP/MTs;
  - ee) Peningkatan penerimaan insentif bagi guru/tenaga kependidikan;
  - ff) Pelaksanaan UNAS silang penuh baik lokasi maupun pengawasan;
  - gg) Monitoring dan evaluasi serta supervisi pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran SMP/MTs;
  - hh) Memberlakukan membaca wajib 10 menit setiap awal masuk kelas setiap hari bagi seluruh warga belajar, baik kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, TU dan terutama siswa untuk mengembangkan budaya baca (*drop every thing and read*);
  - ii) Meningkatkan kemitraan sekolah dengan DUDI yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengikat.
- 4) Program Pendidikan Menengah di SMA
- a) Pengembangan dan pelaksanaan KTSP secara berkelanjutan;
  - b) Pengembangan perangkat pembelajaran, bahan ajar, model pembelajaran berbasis pada pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efisien dan menyenangkan (PAIKEM) dan sistem penilaian;
  - c) Bantuan pengadaan perpustakaan dan penambahan koleksi bagi SMA;
  - d) Bantuan pembelian buku ajar standar;
  - e) Membangun laboratorium komputer bagi SMA dan atau melengkapi sarana laboratorium sains serta laboratorium bahasa;
  - f) Bantuan pengembangan media belajar, dan alat pendidikan;
  - g) Bantuan pembinaan dan pelaksanaan akreditasi bagi SMA;
  - h) Pengembangan SMA nasional bertaraf internasional sebagai SMA asuh bagi SMA lainnya dalam satu wilayah;
  - i) Perintisan SMA nasional bertaraf internasional dengan penerapan bilingual;
  - j) Pengembangan muatan lokal di SMA berbasis potensi daerah;
  - k) Pemberian beasiswa bagi siswa SMA berprestasi;
  - l) Pemilihan siswa SMA teladan;



- m) Olympiade sains, matematika, lomba *English conversation*, bagi siswa SMA baik di tingkat lokal, regional, nasional dan atau internasional;
- n) Lomba kreativitas bagi siswa SMA;
- o) Pelatihan penulisan karya ilmiah (berbasis PTK/RA dan lain-lain) bagi guru;
- p) Lomba penulisan karya ilmiah bagi guru SMA;
- q) Lomba kreativitas bagi guru SMA;
- r) Pemilihan guru SMA teladan tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi Jawa Timur dan pengirimannya dalam lomba tingkat nasional dengan sosialisasi intensif;
- s) Penyelenggaraan POPDA tingkat SMA se Kabupaten/Kota dan se provinsi Jawa Timur;
- t) Bantuan untuk sertifikasi (kuliah) dan uji kompetensi pendidik SMA;
- u) Penyusunan *Teacher Identification Number* (TIN) bagi persiapan pemberian tunjangan profesi;
- v) Diklat pengembangan konsep dan metodologi pembelajaran terkini berlandaskan *transformative learning* dan paradigma *learn-unlearn-relearn* serta falsafah pendidikan terkini lainnya;
- w) Diklat UKS dan Pendidikan Gizi bagi guru Penjaskes;
- x) Diklat penggunaan ICT (termasuk *e-learning*) bagi guru/tenaga pendidikan dan Kepala Sekolah;
- y) Diklat teknologi dan pengolahan produk potensi daerah bagi guru muatan lokal;
- z) Lokakarya implementasi budi pekerti luhur di sekolah;
- aa) Bantuan penyusunan modul pembelajaran etika dan budi pekerti luhur;
- bb) Revitalisasi gerakan kependuan/Pramuka di SMA;
- cc) Diklat Siaran Radio Pendidikan (SRP) bagi guru/tenaga kependidikan;
- dd) Kursus bahasa Inggris jarak jauh bagi guru SMA;
- ee) Peningkatan penerimaan insentif bagi guru/tenaga kependidikan;
- ff) Pelaksanaan UN silang penuh baik lokasi maupun pengawasan;
- gg) Monitoring dan evaluasi serta supervisi pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran SMA;
- hh) Memberlakukan membaca wajib 10 menit setiap awal masuk kelas setiap hari bagi seluruh warga belajar, baik kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, TU dan terutama siswa; untuk mengembangkan budaya baca (*drop every thing and read*)

- ii) Meningkatkan kemitraan sekolah dengan DUDI yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengikat.
- 5) Program Pendidikan Menengah di SMK
- a) Pengembangan dan pelaksanaan KTSP secara berkelanjutan;
  - b) Pengembangan perangkat pembelajaran bahan ajar, model pembelajaran berbasis pada pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efisien dan menyenangkan (PAIKEM) dan sistem penilaian;
  - c) Bantuan pengadaan perpustakaan dan penambahan koleksi bagi SMK;
  - d) Bantuan pembelian buku ajar standar;
  - e) Membangun laboratorium komputer bagi SMK dan atau melengkapi sarana, laboratorium bahasa, bengkel kerja, bengkel praktik, dan *showroom*;
  - f) Bantuan pengembangan sarana prasarana pendidikan, dan subsidi bahan praktik pembelajaran;
  - g) Bantuan pembinaan dan pelaksanaan akreditasi bagi SMK;
  - h) Pengembangan SMK berstandar nasional dan bertaraf internasional;
  - i) Pengembangan muatan lokal di SMK berbasis potensi daerah;
  - j) Pemberian beasiswa bagi siswa SMK berprestasi, miskin, dan yang masuk pada program keahlian khusus;
  - k) Pemilihan siswa SMK berprestasi melalui lomba kompetensi siswa;
  - l) Lomba Kompetensi Siswa (*skill olympic*) bagi siswa SMK baik di tingkat lokal regional, nasional, dan ASEAN;
  - m) Lomba kreativitas bagi siswa SMK;
  - n) Pelatihan penulisan karya ilmiah (berbasis PTK/RA dan lain-lain) bagi guru;
  - o) Lomba penulisan karya ilmiah bagi guru SMK;
  - p) Lomba kreativitas bagi guru SMK;
  - q) Pemilihan guru SMK teladan tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi Jawa Timur dan pengirimannya dalam lomba tingkat nasional dengan sosialisasi intensif;
  - r) Penyelenggaraan POPDA tingkat SMK se Kabupaten/Kota dan se provinsi Jawa Timur;
  - s) Bantuan untuk sertifikasi (kuliah) dan uji kompetensi pendidik SMK;
  - t) Penyusunan *Teacher Identification Number* (TIN) bagi persiapan pemberian tunjangan profesi;

- u) Diklat pengembangan konsep dan metodologi pembelajaran terkini berlandaskan konsep *teaching factory* dan paradigma *learn-unlearn-relearn* serta falsafah pendidikan terkini lainnya;
  - v) Diklat UKS dan Pendidikan Gizi bagi guru Penjaskes;
  - w) Diklat penggunaan ICT (termasuk *e-learning*) bagi guru/tenaga pendidikan dan Kepala Sekolah;
  - x) Diklat teknologi dan pengolahan produk potensi daerah bagi guru muatan lokal;
  - y) Lokakarya implementasi budi pekerti luhur di sekolah;
  - z) Bantuan penyusunan modul pembelajaran etika dan budi pekerti luhur;
  - aa) Revitalisasi gerakan kepanduan/Pramuka di SMK;
  - bb) Revitalisasi peralatan praktik;
  - cc) Diklat Siaran Radio Pendidikan (SRP) bagi guru/tenaga kependidikan;
  - dd) Kursus bahasa Inggris jarak jauh bagi guru SMK;
  - ee) Peningkatan penerimaan insentif bagi guru/tenaga kependidikan;
  - ff) Pelaksanaan UNAS silang penuh baik lokasi maupun pengawasan;
  - gg) Monitoring dan evaluasi serta supervisi pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran SMK;
  - hh) Memberlakukan membaca wajib 10 menit setiap awal masuk kelas setiap hari bagi seluruh warga belajar, baik kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, TU dan terutama siswa untuk mengembangkan budaya baca (*drop every thing and read*);
  - ii) Meningkatkan kemitraan sekolah dengan DUDI yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengikat;
  - jj) Intensifikasi penggunaan ICT dan ber-ISO 9001:2000.
- 6) Program Sekolah Bagi Anak Berkebutuhan Khusus
- a) Pengembangan dan pelaksanaan KTSP;
  - b) Pengembangan bahan ajar, model pembelajaran dan sistem penilaian;
  - c) Bantuan pengadaan perpustakaan dan penambahan koleksi bagi SLB;
  - d) Pemberian buku ajar yang *up to date* dan berstandar;
  - e) Bantuan pengembangan media belajar, dan alat pendidikan;
  - f) Bantuan pendampingan akreditasi bagi SLB;
  - g) Pemberian beasiswa bagi siswa SLB berprestasi;
  - h) Pemilihan guru dan siswa SLB teladan;
  - i) Lomba kreativitas bagi siswa SLB;

- j) Pelatihan penulisan karya ilmiah (berbasis PTK/RA dan lain-lain) bagi guru;
  - k) Lomba penulisan karya ilmiah bagi guru SLB;
  - l) Lomba kreativitas bagi guru SLB;
  - m) Pemilihan guru SLB teladan tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi Jawa Timur dan pengirimannya dalam lomba tingkat nasional;
  - n) Penyelenggaraan Porseni tingkat SLB se Kabupaten/Kota dan se provinsi Jawa Timur;
  - o) Bantuan untuk sertifikasi (kuliah) dan uji kompetensi pendidik SLB;
  - p) Penyusunan *Teacher Identification Number* (TIN) bagi persiapan pemberian tunjangan profesi;
  - q) Diklat pengembangan konsep dan metodologi pembelajaran terkini berlandaskan *transformative learning/evolutionary learning* dan paradigma *learn-unlearn-relearn*;
  - r) Diklat UKS dan Pendidikan Gizi bagi guru Penjaskes;
  - s) Diklat penggunaan ICT (termasuk *e-learning*) bagi guru/tenaga pendidikan dan Kepala Sekolah;
  - t) Lokakarya implementasi budi pekerti luhur di sekolah;
  - u) Bantuan penyusunan modul pembelajaran etika dan budi pekerti luhur;
  - v) Diklat Siaran Radio Pendidikan (SRP) bagi guru/tenaga kependidikan;
  - w) Pendidikan bahasa Inggris jarak jauh bagi guru SLB;
  - x) Peningkatan penerimaan insentif bagi guru/tenaga kependidikan
  - y) Monitoring dan evaluasi serta supervisi pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran di SLB;
  - z) Penambahan jumlah sekolah inklusif di SD/MI, SMP/MTs dan SMA;
  - aa) Pengadaan kelas akselerasi di SD/MI, SMP/MTs dan SMA;
  - bb) Meningkatkan kemitraan sekolah dengan DUDI yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengikat.
- 7) Program Sekolah Non Formal
- a) Pengembangan perangkat pembelajaran, bahan ajar, model pembelajaran berbasis pada pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efisien dan menyenangkan (PAIKEM) dan sistem penilaian;
  - b) Bantuan pengadaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan penambahan koleksinya, penambahan unit Perpustakaan Keliling;
  - c) Bantuan *block grant* TBM, *life skills*, kesetaraan, dan beasiswa;

- d) Bantuan pembelian buku ajar standar;
  - e) Bantuan pengembangan media belajar, dan alat pendidikan;
  - f) Bantuan pendampingan dalam penyusunan modul tematik dan bahan ajar;
  - g) Pemilihan tutor teladan tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi Jawa Timur dan pengirimannya dalam lomba tingkat nasional;
  - h) Diklat pengembangan konsep dan metodologi pembelajaran terkini;
  - i) Berlandaskan *andragogy* dan paradigma *learn-unlearn-relearn*;
  - j) Bantuan penyusunan modul pembelajaran etika dan budi pekerti luhur;
  - k) Pendampingan penyusunan modul kewirausahaan;
  - l) Peningkatan penerimaan insentif bagi tutor;
  - m) Pelaksanaan evaluasi formatif dan tahap akhir;
  - n) Monitoring dan evaluasi serta pendampingan pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran di pendidikan non formal;
  - o) Meningkatkan kemitraan sekolah dengan DUDI yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengikat;
  - p) Implementasi pembelajaran kreatif (kemah karya, gelar karya) dalam pendidikan kesetaraan.
  - q) Implementasi *school come to client* dalam wujud *mobile teacher*/tutor dan penerapan e-learning dalam pendidikan kesetaraan.
- 8) Program pengembangan dan peningkatan budaya dan kesenian di sekolah
- Kegiatan yang diusulkan adalah
- a) Peningkatan apresiasi seni bagi guru dan siswa;
  - b) Peningkatan kemampuan guru kesenian melalui workshop, lokakarya, diskusi, dan magang ketrampilan seni;
  - c) Peningkatan penyusunan perangkat pembelajaran dan media pembelajaran kesenian;
  - d) Peningkatan intensitas kegiatan berkesenian di lingkungan sekolah;
  - e) Peningkatan kreatifitas seni di lingkungan sekolah;
  - f) Peningkatan penyajian kesenian sanggar seni di sekolah;
  - g) Peningkatan kepelatihan kesenian bagi siswa;
  - h) Peningkatan pemberian sarana prasarana kesenian baik secara kualitas maupun kuantitas di sekolah;
  - i) Peningkatan pagelaran, pameran dan festival serta lomba antar sanggar seni sekolah;

- j) Peningkatan kemampuan teknis berkesenian bagi pengelola sanggar seni di sekolah melalui pelatihan, workshop, sarasehan dan sebagainya yang relevan;
- k) Melakukan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan bagi pelaksanaan dan pengembangan kesenian di sekolah-sekolah;
- l) Implementasi pembelajaran PAIKEM untuk pengembangan kualitas pendidikan kesenian di sekolah.

9) Program Pendidikan Keolahragaan

Mendirikan dan mengembangkan SMANOR (SMA Negeri Olahraga) untuk memwadah para siswa yang berbakat khusus dalam bidang olahraga atau memiliki kecerdasan kinestetik tinggi. Pada tahap pertama dibuka dan dikembangkan 6 (enam) cabang olahraga, yakni : gulat, judo, pencak silat, atletik, renang/selam dan sepak takraw. Lokasi sekolah di Kecamatan Buduran Sidoarjo.

c. Program Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik

1) Program PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

- a) Pembinaan administrasi kinerja TK/RA, TPA dan KB;
- b) Pengadaan komputer untuk kelancaran administrasi;
- c) Diklat MBS bagi Kepala Sekolah dan Yayasan;
- d) Diklat supervisi dan pengawasan bagi Pengawas PAUD;
- e) Sosialisasi terpadu tentang pentingnya peranan PAUD;
- f) Lokakarya pemantapan dan penyusunan Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi guru/tenaga kependidikan dan pengawas.

2) Program : Pendidikan Dasar di SD/MI

- a) Pembinaan administrasi kinerja SD/MI;
- b) Pengadaan komputer untuk kelancaran administrasi;
- c) Pemberian BOS/Bopda secara selektif berdasar data akurat;
- d) Diklat MBS bagi Kepala sekolah dan Yayasan;
- e) Menerapkan pola rekrutmen Kepala Sekolah secara ketat dan objektif berdasarkan kompetensi dan kinerjanya melalui *fit and proper test*;
- f) Diklat supervisi dan pengawasan bagi Pengawas SD/MI;
- g) Lokakarya pemantapan dan penyusunan Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi guru/tenaga kependidikan dan pengawas.

3) Program Pendidikan Dasar di SMP/MTs

- a) Pembinaan administrasi kinerja SMP/MTs;
- b) Pengadaan komputer untuk kelancaran administrasi;
- c) Pemberian BOS (Bantuan Operasional Sekolah )/Bopda secara selektif berdasar data akurat dan berkelanjutan;
- d) Diklat MBS bagi Kepala Sekolah dan Yayasan;

- e) Menerapkan pola rekrutmen Kepala Sekolah secara ketat dan objektif berdasarkan kompetensi dan kinerjanya melalui *fit and proper test*;
  - f) Diklat supervisi dan pengawasan bagi Pengawas SMP/MTs;
  - g) Lokakarya pemantapan dan penyusunan Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi guru/tenaga kependidikan dan pengawas.
- 4) Program Pendidikan Menengah di SMA
- a) Pembinaan administrasi kinerja SMA;
  - b) Pengadaan komputer untuk kelancaran administrasi;
  - c) Pemberian BOMM (Bantuan Operasional Manajemen Mutu) dan BKSM secara selektif berdasar data akurat dan berkelanjutan;
  - d) Diklat MBS bagi Kepala Sekolah dan Yayasan;
  - e) Menerapkan pola rekrutmen Kepala Sekolah secara ketat dan objektif berdasarkan kompetensi dan kinerjanya melalui *fit and proper test*;
  - f) Diklat supervisi dan pengawasan bagi Pengawas SMA;
  - g) Lokakarya pemantapan dan penyusunan Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi guru/tenaga kependidikan dan pengawas.
- 5) Program Pendidikan Menengah di SMK
- a) Pembinaan administrasi kinerja SMK;
  - b) Pengadaan komputer untuk kelancaran administrasi;
  - c) Pemberian BOMM (Bantuan Operasional Manajemen Mutu) dan BKSM secara selektif berdasar data akurat dan berkelanjutan;
  - d) Diklat MBS bagi Kepala sekolah dan Yayasan;
  - e) Menerapkan pola rekrutmen Kepala Sekolah secara ketat dan objektif berdasarkan kompetensi dan kinerjanya melalui *fit and proper test*;
  - f) Workshop supervisi dan pengawasan bagi Pengawas SMK;
  - g) Workshop koordinasi pengawas SMK provinsi dan kabupaten/kota;
  - h) Lokakarya pemantapan dan penyusunan Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi guru/tenaga kependidikan dan pengawas.
- 6) Program Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (SLB)
- a) Pembinaan administrasi kinerja SLB;
  - b) Pengadaan komputer untuk kelancaran administrasi;
  - c) Pemberian BOS/Bopda secara selektif berdasar data akurat;
  - d) Diklat MBS bagi Kepala sekolah dan Yayasan;
  - e) Menerapkan pola rekrutmen Kepala Sekolah secara ketat dan objektif berdasarkan kompetensi dan kinerjanya melalui *fit and proper test*;

- f) Diklat supervisi dan pengawasan bagi Pengawas SLB;
  - g) Lokakarya pemantapan dan penyusunan Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi guru/tenaga kependidikan dan pengawas.
- 7) Program Pendidikan Non Formal (PLS)
- a) Pembinaan dan pendampingan pelaksanaan administrasi kinerja PLS;
  - b) Pengadaan komputer untuk kelancaran administrasi;
  - c) Diklat MBS bagi Direktur dan Yayasan;
  - d) Diklat supervisi dan pengawasan bagi Pengawas PLS.
- 8) Program Peningkatan Layanan Pendidikan Kesenian
- a) Peningkatan akses informasi dan publikasi seni budaya, khususnya seni budaya Jawa Timur melalui media elektronika dan cetak;
  - b) Peningkatan pemanfaatan gedung Taman Budaya di Surabaya dan Taman Kridha Budaya Jawa Timur di Malang sebagai wahana pembelajaran, pengenalan, gelar apresiasi seni di Jawa Timur;
  - c) Peningkatan koordinasi dan sosialisasi program pendidikan dan pengembangan kesenian sekolah di Jawa Timur;
  - d) Peningkatan penatausahaan dan pelayanan masyarakat dalam bidang seni budaya;
  - e) Peningkatan dan pengembangan paguyuban peminat seni tradisional di sekolah;
  - f) Peningkatan pencitraan sekolah-sekolah seni di Provinsi Jawa Timur, melalui media cetak dan elektronika (misal internet)

### C. Peranan Rencana Strategis dalam Pembangunan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 merupakan usaha nyata yang dilaksanakan oleh institusi pada tataran *strategic change* (perubahan strategis). Rencana strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun oleh pimpinan untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Rencana Strategis ini berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yakni tahun 2009-2014 dengan memperhitungkan potensi peluang, dan kendala yang ada dan yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Fungsi Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 adalah sebagai acuan:

1. Merencanakan dan melakukan perubahan strategis. Dengan dicanangkannya rencana strategis, institusi dapat menyiapkan perubahan secara proaktif, dan bukan hanya sekadar bereaksi terhadap perubahan yang terjadi;



2. Mengelola keberhasilan. Dengan rencana strategis, institusi membangun strateginya sebagai bagian penting dari orientasi hasil. Kapabilitas dan sumber daya difokuskan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan;
3. Memberi orientasi ke masa depan (*future oriented*). Rencana strategis mengumpulkan informasi secara holistik untuk kemudian menyiapkan analisis atas berbagai alternatif dan implikasi yang dapat diarahkan ke masa depan;
4. Melakukan adaptasi dan fleksibilitas. Penyesuaian dengan prinsip fleksibilitas terhadap perkembangan yang muncul dapat dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada;
5. Memberi pelayanan prima (*service excellence*). Rencana strategis disusun dengan keinginan untuk memberikan pelayanan prima kepada para *customers* dan para *stakeholders* Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
6. Meningkatkan komunikasi. Rencana strategis memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi perbedaan kepentingan dan nilai, mendorong proses pengambilan keputusan yang teratur serta keberhasilan pencapaian tujuan.

Komponen Rencana Strategis Pendidikan Provinsi Jawa Timur meliputi 4 (empat) aspek, yakni:

1. Mengetahui di mana kita pada saat ini (*where are we now?*) melalui identifikasi *customer* dan *stakeholders*, dan kajian terhadap lingkungan, baik internal maupun eksternal;
2. Mengetahui ke mana kita akan menuju (*where do we want to be?*) melalui perumusan visi, misi dan tujuan organisasi/institusi di masa yang akan datang;
3. Mengetahui bagaimana cara mencapai tujuan (*how do we get there?*) yakni melalui penetapan program, sasaran program, dan alokasi sumber daya organisasi;
4. Mengetahui bagaimana cara mengukur kemajuan (*how do we measure our progress?*). Organisasi harus memonitor dan mengevaluasi kemajuan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dengan pengukuran kinerja dan memantau/evaluasi keberhasilan program.

Sementara itu, ada sejumlah faktor yang menentukan keberhasilan rencana strategis. Di antara faktor-faktor yang diperhatikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam merumuskan dan mempersiapkan rencana strategis, antara lain:

1. Kemampuan menetapkan strategi, yakni menentukan visi, misi dan tujuan yang akan dicapai;
2. Kemampuan mengenali lingkungan di mana institusi mengimplementasikan interaksinya, terutama suasana pelayanan yang wajib diselenggarakan oleh institusi kepada masyarakat;
3. Kemampuan melakukan SWOT (*strengths, weakness, opportunities* dan *threats*). Hal ini berkaitan dengan *positioning* institusi;

4. Kemampuan mempersiapkan semua faktor penunjang yang diperlukan, terutama dalam mencapai keberhasilan operasional institusi seperti sumber daya manusia, teknologi, dana, metode kerja, dan lain-lain;
5. Kemampuan menciptakan sistem umpan balik untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pencapaian implementasi rencana strategis. Dengan kata lain rencana strategis harus senantiasa dimonitor dan dievaluasi (monev) untuk dapat tetap terkini.